

DJKN

KPKNL PEKANBARU

**LAPORAN
KINERJA
2021**



PENGANTAR

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Pekanbaru atas penggunaan anggaran. Fokus utama dalam menyusun laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Pekanbaru mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Permenpan Nomor 53/2014).

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru pada tahun 2020 adalah 100,27%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *stakeholder perspective* dengan capaian kinerja 31,47% (bobot 40%), *internal process perspective* dengan capaian kinerja 34,18% (bobot 30%), dan *learning and growth perspective* dengan capaian kinerja 34,62% (bobot 30%).

Pencapaian tersebut merupakan bentuk pelayanan KPKNL Pekanbaru terhadap *stakeholder* yang selama ini berkontribusi atas penerimaan negara di bidang pengelolaan kekayaan negara. Pelayanan tersebut tercermin pada hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan dengan indeks 4.57 dari skala 5.00. Hasil survei ini diharapkan dapat meningkatkan citra KPKNL Pekanbaru dan DJKN di mata *stakeholder* serta menambah semangat pegawai KPKNL Pekanbaru dalam meningkatkan kinerja selanjutnya.

Demikian, semoga laporan kinerja ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan kinerja di masa mendatang, serta sebagai pendorong dalam meningkatkan kinerja KPKNL Pekanbaru.



RACHMAT KURNIAWAN
Kepala KPKNL Pekanbaru

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	3
Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
Perjanjian Kinerja	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
Capaian Kinerja Organisasi	8
Realisasi Anggaran	46
Achievement / Penghargaan Yang Diterima	48
BAB IV PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL Pekanbaru dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPKNL Pekanbaru merupakan unit eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang meliputi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Di awal tahun 2021, KPKNL Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 7 (tujuh) unit eselon IV dan 5 (lima) kelompok jabatan fungsional. Unit eselon IV terdiri dari: Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Pelayanan Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal. Sedangkan kelompok jabatan fungsional terdiri dari Pelelang Ahli Madya, Pelelang Ahli Muda, Pelelang Ahli Pertama, Penilai Pemerintah Ahli Pertama, Analis Pengelola Keuangan APBN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi KPKNL terdiri atas Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum dan Informasi, Seksi Kepatuhan Internal dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan demikian, tidak ada lagi Seksi Pelayanan Lelang dan Seksi Pelayanan Penilaian.

Pejabat Pengawas pada Seksi Pelayanan Lelang dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian dikukuhkan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1437/KM.1/UP.11/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1438/KM.1/UP.11/2021, Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Pekanbaru diangkat menjadi Pelelang Ahli Muda KPKNL Pekanbaru, dan Kepala Seksi Pelayanan Penilaian KPKNL Pekanbaru diangkat menjadi Penilai Pemerintah Ahli Muda KPKNL Pekanbaru.

Berdasarkan PMK terbaru tersebut, di akhir tahun 2021, komposisi jabatan pada KPKNL Pekanbaru terdiri dari 5 (lima) Jabatan Eselon IV (Jabatan Pengawas) dan 6 (enam) Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jabatan Pengawas
 1. Subbagian Umum;
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;

3. Seksi Piutang Negara;
 4. Seksi Hukum dan Informasi;
 5. Seksi Kepatuhan Internal.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Pelalang Ahli Madya;
 2. Pelelang Ahli Muda;
 3. Pelelang Ahli Pertama;
 4. Penilai Pemerintah Ahli Muda;
 5. Penilai Pemerintah Ahli Pertama;
 6. Analis Pengelola Keuangan APBN.

Struktur Organisasi KPKNL Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1.1
Bagan Organisasi KPKNL Pekanbaru



Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Pekanbaru didukung oleh 29 pegawai (data per 31 Desember 2021), yang terdiri dari 1 Pejabat Administrator (Kepala Kantor), 5 Pejabat Pengawas (Kepala Subbagian /Seksi), 10 Pejabat Fungsional dan 13 Pelaksana.

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, DJKN berperan pada Tujuan 5 yaitu Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pembiayaan Anggaran. Sasaran strategis dari Tujuan 5 ini adalah 1) pengelolaan kekayaan negara yang optimal; 2) pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal. DJKN diberikan mandat untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan kekayaan negara yang optimal. Adapun Indikator- indikator yang digunakan untuk mengukur capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap, b) rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian

Keuangan terhadap total ekuitas. Untuk mencapai kondisi tersebut, DJKN telah merumuskan rencana strategi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Sejalan rencana strategis DJKN, KPKNL Pekanbaru turut melaksanakan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. pengamanan kekayaan negara melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum;
- b. implementasi perencanaan kebutuhan BMN (asset planning) melalui penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk pengadaan dan pemeliharaan BMN;
- c. membentuk Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang menyajikan informasi terkait dengan penatausahaan aset (quick wins);
- d. mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat satker;
- e. digitalisasi proses bisnis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang;
- f. mengoptimalkan hasil pengelolaan aset melalui penagihan terhadap aset kredit, serta penjualan, pemanfaatan, dan penetapan status penggunaan aset properti.

Salah satu kondisi yang menjadi salah satu permasalahan utama bagi KPKNL Pekanbaru adalah adanya pandemic *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Sebagai Bencana Nasional di Indonesia (sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020), berdampak terhadap seluruh aspek, termasuk dalam pencapaian target kinerja KPKNL Pekanbaru.

Pandemi Covid-19 juga memberikan dampak pada proses bisnis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan layanan. Penyesuaian proses bisnis terkait lelang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan sekaligus melindungi pegawai dan stakeholders di masa pandemi melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 5/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Lelang pada KPKNL dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selain itu, penyesuaian proses bisnis terkait Piutang Negara juga dilakukan melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 7/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Pengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

Lelang dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Selanjutnya, proses bisnis terkait pelayanan Penilaian juga dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2020 tentang Panduan Pemberian Layanan Penilaian dan Analisis di Bidang Penilaian dalam Status Bencana Nasional Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Pekanbaru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai KPKNL Pekanbaru, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi KPKNL Pekanbaru.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Pekanbaru tahun 2021, termasuk penjelasan terkait addendum kontrak kinerja.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Mengungkapkan pengukuran capaian indikator kinerja utama yang telah dicapai KPKNL Pekanbaru, evaluasi dan analisis kinerja, upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan, analisis pelaksanaan mitigasi risiko, rencana aksi ke depan dan realisasi anggaran.

4. Bab IV Penutup

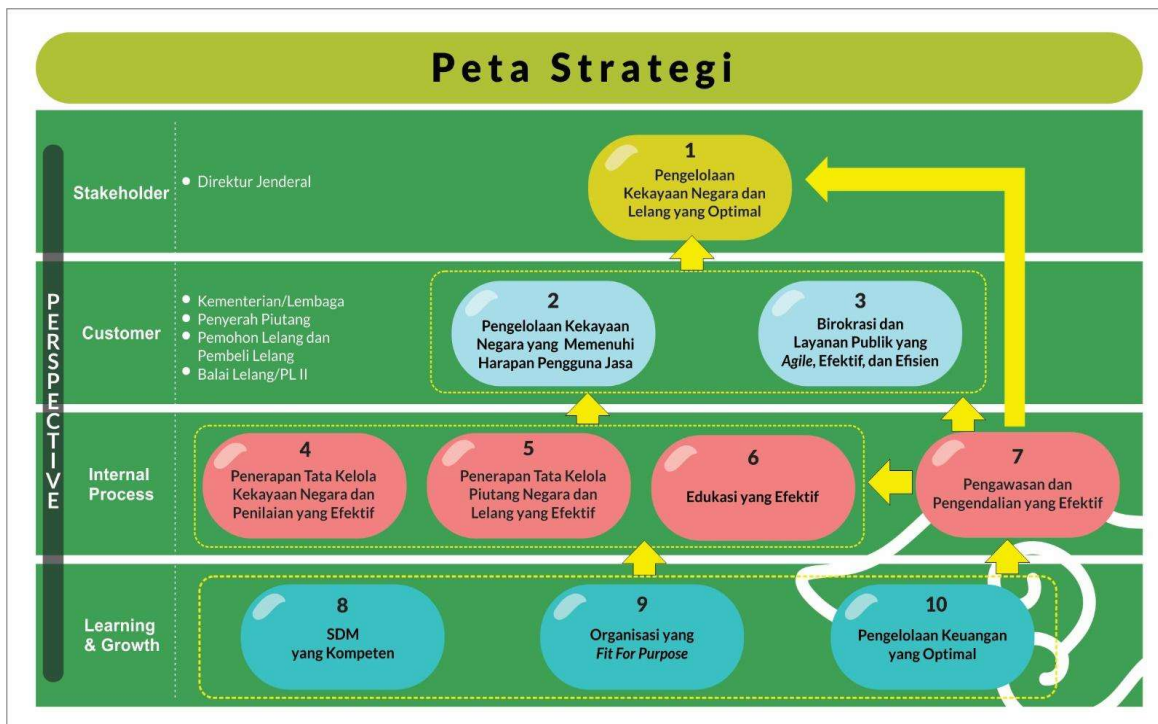
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Gambar 2.1
Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2021



Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Pekanbaru harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Pekanbaru. Sasaran Strategis KPKNL Pekanbaru Tahun 2021 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi Kemenkeu *Three* Tahun 2021 yang terlihat pada Gambar 2.1.

Peta Strategis Kemenkeu *Three* Tahun 2021 memuat 10 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Target IKU Kemenkeu *Three* KPKNL Pekanbaru Tahun 2021

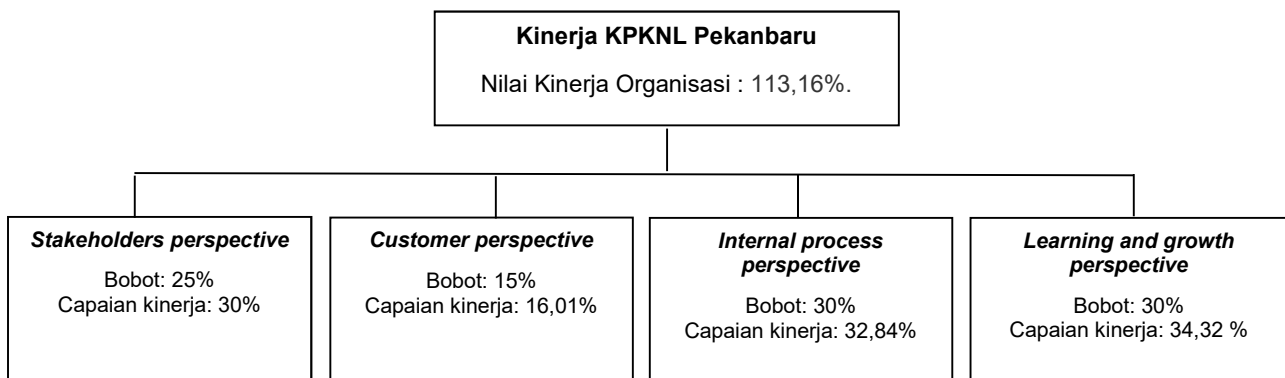
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	62%
		1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	100%
		1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	100%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Layanan Kekayaan Negara dan Lelang	96,5
		2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
3.	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	4,59
4.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif	4a-CP	Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikasi	100%
		4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		4c-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	22%
5.	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP	100%
		5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	35%
		5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang <i>E-Auction</i> dan <i>E-Conventional Auction</i>	92%
		5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	12,5%
6	Edukasi yang Efektif	6a-N	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	95
7.	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	7a-CP	Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara	85%
8.	SDM yang Kompeten	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%
9.	Organisasi yang Fit For Purpose	9a-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	75
		9b-N	Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80
10.	Pengelolaan Keuangan yang Optimal	10a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%
		10b-N	Persentase Tindaklanjutan Penyelesaian Temuan BA 015	90%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

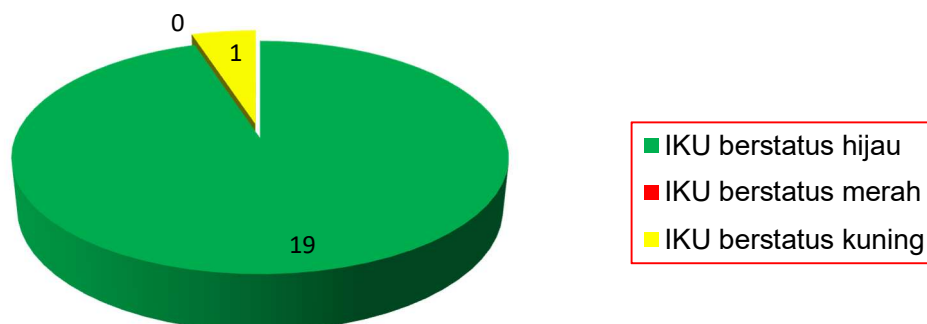
Pengukuran capaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Pekanbaru adalah sebesar 113,16%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Capaian Kinerja Masing-Masing Perspektif



Selama tahun 2021, dari 20 IKU KPKNL Pekanbaru, secara keseluruhan 19 IKU berstatus hijau atau tercapai, 1 IKU berstatus kuning. dan 1 IKU berstatus merah. Perbandingan jumlah IKU berdasarkan indeks capaian tertuang dalam grafik berikut berikut.

Perbandingan Jumlah IKU Berdasarkan Indeks Capaian



Berikut rincian capaian kinerja atas 20 IKU KPKNL Pekanbaru tahun 2021:

Sasaran Strategis, Target, Realisasi, dan Capaian KPKNL Pekanbaru Tahun 2021

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
	Stakeholder Perspective(25%)							30,00%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							120,00%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	80,65%	19%	40%	130,081%	120,00%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	127,82%	14%	30%	127,82%	120,00%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	259%	14%	30%	258,93%	120,00%	hijau
	Customer Perspective(15%)							16,01%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							112,78%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	96,50	99,96	11%	44%	103,58%	103,58%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	164,23%	14%	56%	164,23%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							100,65%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	459%	4,62	21%	100%	100,65%	100,65%	hijau
	Internal Process Perspective (30%)							32,84%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							112,77%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	103,26%	19%	43%	103,26%	103,26%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/H	100%	122,06%	11%	25%	122,06%	120,00%	hijau
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,08%	14%	32%	199,64%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							114,06%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	107,53%	14%	25%	107,53%	107,53%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	46,81%	14%	25%	133,76%	120,00%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conve	P/M	92,00%	100,00%	14%	25%	108,70%	108,70%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6								101,66%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	95	96,57	14%	100%	101,66%	101,66%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							109,34%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	92,94%	14%	100%	109,34%	109,34%	hijau
	Learning & Growth Perspective (30%)							34,32%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang fit for purpose							120,00%	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	96,65	14%	50%	128,87%	120,00%	hijau
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	99,35	14%	50%	124,19%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							103,15%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	94,89%	14%	50%	99,36%	99,36%	kuning
10b-N	Persentase tindak lanjut temuan BA 15	P/M	90,0%	96,25%	14%	50%	106,94%	106,94%	hijau
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								113,16%	hijau

Dari capaian kinerja terhadap 20 IKU Kemenkeu *Three* tahun 2021 tersebut, KPKNL Pekanbaru melakukan analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* tahun 2021. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara target awal tahun dengan realisasi kinerja tahun 2021. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. SASARAN STRATEGIS 1: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG OPTIMAL

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara (BMN), kekayaan negara dipisahkan (KND), kekayaan negara lain-lain (KNL), penilaian, piutang negara, dan lelang.

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: 1) perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND; 2) pengurusan piutang negara; dan 3) pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila 1) aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), 2) adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating), 3) tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum), 4) adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru mengidentifikasi 3 IKU. Uraian mengenai ketiga IKU adalah sebagaimana berikut.

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK)

1) Deskripsi Kinerja

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Deskripsi IKU ini adalah penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (SBSK BMN) atas pengelolaan

Aset Negara termasuk existing luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Capaian diperoleh dari rata-rata penghitungan formula pengukuran (dengan bobot 75%) dan formula optimalisasi (bobot 25%). Rumus formula pengukuran adalah sebagai berikut:

Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$
n =	jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x =	rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek per satuan kerja

Sedangkan untuk formula optimalisasi adalah sebagai berikut:

Rata-Rata Tertimbang =	$\frac{(n1 \times x1) + (n2 \times x2) + (n3 \times x3) + (n4 \times x4)}{(n1 + n2 + n3 + n4)}$
n =	jumlah nup per jenis objek per satuan kerja
x =	rata-rata persentase kesesuaian per jenis objek hasil optimalisasi per satuan kerja

Target untuk formula pengukuran adalah satker baru di tahun 2021 yang dilakukan pengukuran SBSK, sejumlah 232 unit. Sedangkan untuk formula optimalisasi, dilakukan terhadap hasil monev tingkat kesesuaian SBSK di tahun 2020, sebanyak 289 unit.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian IKU mencapai 130,081%, dimana realisasi sebesar 80,65% telah mencapai target sebesar 62%.

Capaian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	1a-CP tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Trajectory	-	50%	50%	55%	62%	62%	62%
Realisasi Pengukuran	-	87,93%		81,64%	84,69%		
Realisasi Optimalisasi	-	83,45%		89,19%	68,53%		
Realisasi IKU	-	86,81%		83,53%	80,65%		
Capaian IKU					130,081%		

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2020

	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Target	-	100%	62%
Realisasi	-	103,46%	80,65%
Capaian	-	103,46%	130,081%

3) Analisis Kinerja

Pandemi covid-19 ini memaksa banyak kota memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk Kota Pekanbaru. Review kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK yang membutuhkan koordinasi dengan Satuan Kerja menjadi ikut terbatas.

Meskipun terdapat keterbatasan koordinasi secara tatap muka, namun dengan memanfaatkan teknologi digital, maka koordinasi tetap dapat dilakukan. Upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan satker target. Dalam proses persiapan, koordinasi dapat dilakukan dengan media komunikasi digital, sehingga pada proses pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien.

Program yang dilakukan adalah sosialisasi terkait pelaksanaan program SBSK. Selanjutnya koordinasi dengan satker terkait penggunaan BMN yang sesuai dengan SBSK.

b. Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**1) Definisi Kinerja**

Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara. Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBPN Aset, yaitu PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan yang bersumber dari barang milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Pasal 7 ayat (4), Jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas penggunaan barang milik negara (selisih dari nilai cost yang dikeluarkan dan revenue diterima atas penggunaan aset K/L oleh BUMN berdasarkan hasil audit, dan telah disetorkan ke kas negara), pemanfaatan barang milik negara dan pemindahtanganan barang milik negara.

- b. PNBPN Piutang Negara (PNBPN PN), yaitu Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.
- c. PNBPN Lelang (PNBPN Lelang), yang terdiri dari: bea lelang, bea lelang pegadaian, denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang, biaya permohonan lelang, penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi, penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Untuk tahun 2021, kinerja manfaat ekonomi berupa PNBPN diakui apabila nilai penerimaan atas PNBPN Aset, PN, dan Lelang telah masuk ke rekening kas negara. Pengukuran capaian atas ketiga komponen di atas diperoleh dari perbandingan rata-rata realisasi PNBPN pengelolaan kekayaan negara dan lelang dengan target total PNBPN pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Kinerja PNBPN pengelolaan kekayaan negara dan lelang bersumber dari PNBPN aset, PNBPN PN dan PNBPN lelang. Masing-masing komponen tersebut memiliki target dan realisasi di tahun 2021 sebagai berikut:

Komponen	Target	Realisasi	Capaian
PNBPN Aset	Rp8.520.000.000,00	Rp10.115.613.313,00	118,73%
PNBPN PN	Rp38.531.155,00	Rp134.170.255,00	348,21%
PNBPN Lelang	Rp3.657.000.000,00	Rp5.363.839.456,00	146,67%
Total	Rp12.215.531.155,00	Rp15.613.623.024,00	127,82%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian terbesar ada pada PNBPN dari pengurusan piutang negara, sebesar 348,21%. Realisasi terbesar diperoleh dari biaya administrasi atas angsuran pengurusan piutang negara atas nama PT. Essa Indah Timber. Berikut rincian capaian per triwulan sesuai dengan trajectory pada Kontrak Kinerja pemilik peta strategi.

Capaian Persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan Negara dan lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	1b-CP Persentase penerimaan Negara dari pengelolaan kekayaan Negara dan lelang (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-20
Target	10%	30%	30%	60%	100%	100%	100%
Capaian IKU	20,64%	46,36%	46,36%	73,34%	127,82%	127,82%	127,82%

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2020

	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Target	Rp24.793.564.788	Rp14.369.084.439	Rp12.215.531.155
Realisasi	Rp32.489.832.501	Rp11.634.186.941	Rp15.613.623.024
Capaian	133,50%	80,97%	127,82%

3) Analisis Kinerja

Berbeda dari tahun sebelumnya, target PNBPN di tahun ini dapat tercapai. Di tahun 2020, awal terjadinya pandemi, segala sektor terdampak. Termasuk diantaranya adalah daya beli lelang yang menurun, serta perekonomian debitur yang tidak bagus. Hal ini menyebabkan menurunnya capaian PNBPN di tahun 2020.

Di tahun 2021, perekonomian sudah mulai pulih. Untuk capaian PNBPN dari pengurusan piutang negara memperoleh capaian terbesar di tahun ini dibandingkan sumber PNBPN lainnya. Hal ini disebabkan adanya setoran biad dari PT. Essa Indah Timber yang mencapai Rp105.520.989,00 atau sebanyak 78,65% dari capaian PNBPN PN.

Pada PNBPN Aset dan PNBPN lelang juga mengalami peningkatan dari tahun lalu. Hal ini mungkin disebabkan karena ekonomi masyarakat dan perekonomian nasional sudah mulai pulih, yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada PNBPN Aset peningkatan capaian di tahun 2021, disebabkan karena frekuensi permohonan sewa yang meningkat dari tahun sebelumnya, jumlah tindaklanjut dari penerbitan persetujuan ikut meningkat, dan kontribusi pengelolaan dari barang rampasan yang naik signifikan.

Program atau kegiatan yang dilakukan seksi Piutang Negara untuk mendukung keberhasilan capaian ini adalah koordinasi yang intensif dengan para Debitur dan Penyerah Piutang, terutama dengan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau yang Debiturnya berpotensi untuk membayar/melunasi hutang, contohnya dari PT. Essa Indah Timber tadi. Di bidang pengurusan piutang negara sendiri ada program Keringanan Utang (Crash Program) pada tahun 2021, sehingga semakin banyak debitur yang melunasi hutangnya dan semakin meningkat pula capaian biaya administrasinya.

Kegiatan dari Seksi Lelang adalah maraknya lelang UMKM, adanya program Kedai Lelang, dan penggalan potensi atas lelang UUHT Pasal 6. Sedangkan kegiatan dari Seksi PKN adalah peningkatan koordinasi dengan satuan-satuan kerja yang berpotensi untuk melaksanakan pemanfaatan BMN.

Selain dari kegiatan yang dilaksanakan masing-masing seksi terkait, KPKNL Pekanbaru juga gencar melakukan pemasaran barang lelang, publikasi dan edukasi tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru melalui media website KPKNL Pekanbaru, media sosial dan media papan pengumuman. Program Keringanan Utang, Lelang UMKM dan Kedai Lelang juga disemarakkan melalui media televisi (TVRI Riau), radio (Pro RRI Pekanbaru) dan media cetak.

Di tahun mendatang, selain program dari Kantor Pusat DJKN, KPKNL Pekanbaru juga akan melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian target kinerja PNBPN. Edukasi terkait tugas dan fungsi KPKNL, akan terus ditingkatkan, baik melalui media sosialisasi (tatap muka atau daring), media sosial maupun media elektronik lainnya.

c. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

1) Deskripsi Kinerja

IKU Tingkat Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengelolaan piutang negara dari penagihan piutang negara. Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017. Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU tersebut adalah untuk BKPN dengan SP3N s.d 31 Desember 2017, sebagai berikut: angsuran, penarikan/pengembalian, pelunasan, PSBDT, keringanan hutang terhadap BKPN dengan SP3N per 31 Desember 2017 atau sebelumnya yang lunas pada tahun berjalan.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Target penurunan outstanding piutang negara adalah sebesar Rp6.200.276.634,00 dan pada akhir tahun 2021 tercapai sebesar Rp16.054.408.635,00 atau melebihi target sebesar 258,93%. Tabel 3.6 menunjukkan capaian tingkat outstanding penurunan piutang Negara, yaitu realisasi penurunan nilai outstanding PN dengan target penurunan nilai outstanding PN.

Capaian Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

K-Wide (TLK)	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal						
	1c-CP Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21

Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%	100%
Realisasi/ Capaian IKU	25,02%	46,90%		193,74%	258,93%		

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2020

	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Target	-	3%	100%
Realisasi	-	3,29%	258,93%
Capaian	-	109,67%	258,93%

Meski IKU ini sama di tahun 2020 dan 2021, namun terdapat perbedaan perhitungan capaian IKU. Secara persentase, capaian di tahun 2021 naik drastis dibandingkan tahun 2020.

3) Analisis Kinerja

Realisasi tingkat penurunan outstanding piutang Negara sudah mencapai target. Capaian banyak dibantu dari jumlah PSBDT yang meningkat di akhir tahun 2021. Peningkatan jumlah PSBDT disebabkan karena terbitnya peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Capaian PNDDT juga meningkat akibat adanya program Keringanan Utang (Crash Program) di tahun 2021. Terdapat 15 Debitur yang memanfaatkan program Keringanan Utang ini. Selain crash program, Seksi Piutang Negara juga berupaya maksimal dalam penagihan dan pengurusan piutang negara. Seksi PN melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak Penyerah Piutang dan Debitur.

Meski masih pandemi, koordinasi dan upaya penagihan tetap dapat dilakukan, melalui media surat, telepon, *whatsapp*, atau melalui *zoom meeting*. Koordinasi secara tatap muka dilakukan dengan sangat selektif dan efektif. Pada pelaksanaannya, baik crash program maupun program peraturan terbaru dan upaya penagihan lainnya tidak menemukan kendala atau kesulitan yang berarti.

Ke depannya, KPKNL Pekanbaru akan kembali memetakan debitur berdasarkan potensi yang ada, serta melakukan upaya-upaya penagihan secara optimal.

2. SASARAN STRATEGIS 2: PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YANG MEMENUHI HARAPAN PENGGUNA JASA

Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, KPKNL Pekanbaru menguraikan IKU tersebut sebagaimana berikut:

a. Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara

1) Deskripsi Kinerja

Penyelesaian permohonan dihitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. Pada KPKNL, IKU ini mengukur 14 janji layanan unggulan dengan rincian sebagai berikut.

No	SOP Layanan Unggulan	Janji Layanan
1	Persetujuan/Penolakan Permohonan Sewa BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Integrasi Layanan) pada KPKNL	25-39 hari kerja (tergantung jumlah objek)
2	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	5 hari kerja
3	Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL	7 hari kerja
4	Penetapan Jadwal Lelang	2 hari kerja
5	Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang	1 hari kerja
6	Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang	1 hari kerja
7	Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang	1 hari kerja
8	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (Kas Negara)	1 hari kerja
9	Penyetoran Hasil Bersih Lelang (selain Kas Negara)	3 hari kerja
10	Pelayanan Permohonan Keringanan Utang pada KPKNL	15 hari kerja
11	Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara	3 hari kerja
12	Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/di Atas Nilai Pengikatan	4 hari kerja
13	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas	1 hari kerja
14	Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai	1 hari kerja

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Dapat diketahui bahwa realisasi indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan lelang adalah sebesar 99,66 dari target 96,5, sehingga capaian 103,58%.

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2a-CP indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan Negara dan lelang (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5
Realisasi	100	100	100	100	99,875	99,96	99,96
Capaian							103,58%

Indeks ini diperoleh dari rata-rata capaian seksi pengelolaan kekayaan Negara, seksi lelang, seksi pengurusan piutang Negara, dan seksi Hukum dan Informasi. Berikut adalah capaian per seksi:

PNBP	Capaian IKU		
	Target	Realisasi	Capaian
Seksi PKN	96,5	100	103,62%
Seksi Lelang	96,5	100	103,62%
Seksi HI	96,5	99,86	103,48%
Seksi PN	96,5	100	103,62%
Total	96,5	99,96	103,58%

3) Analisis Kinerja

Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun tahun sebelumnya:

	2019	2020	2021
Target	85	90	96,5
Realisasi	97,16	99,68	99,96
Capaian	114,31%	110,76%	103,58%

Berdasarkan tabel di atas, target IKU ini pada tiga tahun terakhir selalu tercapai. Hal ini menunjukkan komitmen KPKNL Pekanbaru dalam memberikan janji layanan lebih cepat dari norma waktu.

Dengan adanya pandemi covid-19 ini, koordinasi antar pegawai maupun koordinasi dengan pengguna layanan banyak dilakukan menggunakan media telepon, whatsapp dan email. Namun hal ini bukan menjadi masalah besar.

Masing-masing seksi telah merencanakan programnya dalam percepatan pemberian layanan unggulan ini. Seperti sosialisasi layanan, publikasi SOP melalui media sosial, koordinasi dengan pengguna layanan, dan lain sebagainya.

Program dari masing-masing seksi telah dijalankan secara optimal, baik melalui daring maupun secara langsung. Mitigasi risiko tidak tercapainya IKU ini juga sudah dilakukan. KPKNL Pekanbaru akan melakukan kegiatan sosialisasi maupun bimtek secara berkala kepada *stakeholder* dengan memperhatikan pada ketersediaan anggaran. Selain itu, metode sosialisasi lain akan dilakukan baik melalui media sosial, media cetak, elektronik maupun surat dinas.

b. Persentase Realisasi Pokok Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi pokok lelang terdiri dari dua komponen yaitu yang berasal dari pokok lelang kelas I (KPKNL) dan pokok lelang Pegadaian. Berikut adalah capaian dari masing-masing komponen hasil lelang.

PNBP	Capaian		
	Target	Realisasi	Capaian
Pejabat Lelang I	60.000.000.000	91.830.740.902	153,05%
Pegadaian	45.000.000.000	80.609.511.500	179,13%
Total	105.000.000.000	172.440.252.402	164,23%

Untuk capaian IKU-nya per trajectory, dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian IKU Persentase Hasil Lelang

K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa						
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	20%	40%	40%	70%	100%	100%	100%
Capaian IKU	10,49%	46,25%	46,25%	87,16%	164,23%	164,23%	164,23%

Meski di triwulan I, realisasi belum mencapai target, namun kinerja pokok lelang berhasil mengejar target bahkan melampauinya di akhir tahun.

3) Analisis Kinerja

Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, target IKU ini tidak tercapai. Baru di tahun 2021, target dapat tercapai, sebagaimana terlihat pada table berikut:

Uraian	Pokok Lelang
Target 2018	129.408.000.000
Realisasi 2018	75.448.156.228
Capaian 2018	58,30%
Target 2019	172.000.000.000
Realisasi 2019	134.209.165.290
Capaian 2019	78,03%
Target 2020	228.773.000.000
Realisasi 2020	87.404.009.883
Capaian 2020	38,21%
Target 2021	105.000.000.000
Realisasi 2021	172.440.252.402
Capaian 2021	164,23%

Meski target turun di tahun 2021, namun capaiannya tetap meningkat di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja lelang di tahun 2021 semakin baik.

Di tahun 2020, kondisi perekonomian masyarakat dan nasional memang sangat terganggu akibat adanya pandemi covid-19. Masyarakat masih belum berani membelanjakan dananya untuk kebutuhan sekunder atau tersier, baik melalui

lelang.go.id maupun platform penjualan lainnya. Namun demikian, dengan semakin pulihnya perekonomian nasional, beberapa sektor mulai membaik. Hal ini menyebabkan meningkatnya minat masyarakat kepada lelang.

Pada tahun 2021, banyak program DJKN terkait lelang yang dilaksanakan oleh seluruh KPKNL. Diantaranya adalah program Lelang UMKM dan Kedai Lelang. Melalui program ini, KPKNL Pekanbaru berinovasi dan berupaya meningkatkan layanan lelang, sehingga kinerja lelang menjadi semakin meningkat. KPKNL Pekanbaru juga secara intensif melakukan koordinasi dengan perbankan (sebagai pemohon lelang UUHT pasal 6) dan meningkatkan pemasaran objek lelang. Lelang barang rampasan Kejari yang tinggi di tahun ini turut menyumbang kesuksesan dalam kinerja lelang.

KPKNL Pekanbaru terus melakukan sosialisasi dan diskusi dengan pihak perbankan sebagai pemohon lelang, terkait kualitas permohonan lelang. Dengan permohonan lelang yang sudah baik dan sesuai, maka penetapan jadwal lelang menjadi lebih cepat. Dengan adanya inovasi DJKN, verifikasi permohonan online, maka semakin memudahkan pemohon dalam memohonkan lelang dengan sesuai dan mudah. KPKNL Pekanbaru juga berinovasi dengan Sibelalang, dimana pemohon lelang dapat melihat status permohonan lelang mereka dan langsung menindaklanjutinya dalam hal terdapat kurang berkas atau kesalahan dalam permohonan.

Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga telah melakukan edukasi terkait pelaksanaan lelang dan penggunaan lelang.go.id. Edukasi difokuskan kepada masyarakat sebagai pembeli lelang. Edukasi dalam bentuk sosialisasi melalui virtual (kerjasama dengan BDK Pekanbaru dalam program Corpu Kemenkeu), siaran radio RRI, sosialisasi tentang lelang produk UMKM kepada para penggiat UMKM. Edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat semakin kenal dan tertarik membeli barang melalui lelang.go.id.

KPKNL Pekanbaru akan terus melakukan pemasaran produk lelang, melalui media sosial dan papan pengumuman. Selain itu, koordinasi akan semakin ditingkatkan demi mendapatkan potensi lelang yang lebih besar.

3. SASARAN STRATEGIS 3: BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF DAN EFISIEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang prima ditandai dengan terpenuhinya seluruh aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi, sarana dan prasarana, biaya/tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja sehingga berdampak pada terwujudnya kepuasan dan terpenuhinya harapan pengguna layanan (*exceeding customer needs*).

Pemenuhan layanan publik diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen berdasarkan pemenuhan atas asas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak dan kewajiban; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif; (h) keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

a) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

1) Deskripsi Kinerja

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. Pelaksanaan survei lebih difokuskan pada layanan pengelolaan kekayaan Negara, layanan penilaian, layanan lelang dan layanan pengurusan piutang Negara. Survei dilakukan dengan memberikan kuisisioner kepada pengguna layanan untuk menilai kualitas layanan yang telah diberikan.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif, survey dilakukan oleh unit di luar pemberi layanan, yaitu Seksi Kepatuhan Internal.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Pada tabel 3.8 terlihat bahwa realisasi IKU ini telah mencapai target yaitu sebesar 4,59 dari target 4,62 (100,65%).

Capaian Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

K-Wide	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien						
	3a-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	-	-	-	-	4,59	4,59	4,59
Realisasi	-	-	-	-	4,62	4,62	4,62
Capaian	-	-	-	-	100,65%	100,65%	100,65%

Hasil ini merupakan rata-rata dari perhitungan indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan kekayaan Negara, lelang, penilaian dan pengurusan piutang Negara. Sebagaimana tabel berikut:

PNBP	Capaian IKU		
	Target	Realisasi	Capaian
Seksi PKN	4,61	4,64	101,08%
Seksi Lelang	4,58	4,58	100%
Seksi Penilaian	4,59	4,66	101,52%
Seksi PN	4,58	4,58	100%
Rata-rata	4,59	4,62	100,65%

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2020

	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Target	4,37	4,56	4,59
Realisasi	4,53	4,57	4,62
Capaian	103,66%	100,22%	100,65%

3) Analisis Kinerja

Capaian di tahun 2021 berhasil memenuhi target, yaitu sebesar 4,62 atau 100,65%. Target dan capaian di tahun 2021 bahkan naik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa KPKNL Pekanbaru terus berkomitmen dan berupaya dalam meningkatkan pelayanan demi kepuasan para pengguna layanannya.

Kondisi pandemi covid-19 membuat pengguna layanan KPKNL yang datang secara langsung menjadi berkurang. Namun layanan tetap diberikan, baik melalui daring, telepon, maupun media lainnya. Layanan secara tatap muka pun diatur pelaksanaannya. Demi kesehatan dan kenyamanan bersama, pengguna layanan yang datang sebelumnya harus mengisi Daftar Tamu dulu di aplikasi bit.ly/sitopan atau scan barcode di pintu lobby KPKNL Pekanbaru. Pengguna layanan pun diharuskan menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, dilakukan pengukuran suhu dan menjaga jarak dengan pengguna lainnya. Tempat layanan di Area Pelayanan Terpadu (APT) pun sudah diberikan prasarana yang memadai untuk menghindari penularan virus covid-19.

Pengambilan survey atas IKU ini dilakukan dengan mekanisme kombinasi, wawancara langsung dengan pengguna layanan yang datang ke APT atau menggunakan alat *googleform*. Kuesioner melalui *googleform* disampaikan kepada pengguna layanan melalui *whatsapp* atau email. Memang ada kendala dalam penggunaan *googleform*, yaitu pengguna layanan tidak dapat bertanya langsung atau melakukan konfirmasi dalam hal terdapat pertanyaan yang kurang dipahami. Namun seksi Kepatuhan Internal menyediakan nomor telepon yang mudah diakses dalam hal pengguna layanan membutuhkan konfirmasi.

4. SASARAN STRATEGIS 4: PENERAPAN TATA KELOLA KEKAYAAN NEGARA DAN PENILAIAN YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (*good governance*) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

a) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

1) Deskripsi Kinerja

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Penswertipikatan BMN berupa Tanah, dengan tugas/kewajiban masing-masing pihak sebagai berikut:

Kendali BPN:

1. Melaksanakan penswertipikatan BMN;
2. Rekapitulasi data BMN berupa tanah yang telah disertipikatkan

Kendali K/L

1. Inventarisasi dan identifikasi BMN belum bersertifikat beserta permasalahannya;
2. Melengkapi persyaratan penswertipikatan BMN;
3. Menunjukkan letak dan tanda batas tanah;
4. Menyampaikan rekapitulasi data yang akan disertipikatkan;
5. Mengajukan permohonan sertifikasi;
6. Menyusun dan mengajukan anggaran sertifikasi;

7. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN, paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya sertipikat.

Kendali Kemenkeu:

1. Menyimpan asli sertipikat;
2. Updating data BMN yang akan disertipikatkan;
3. Permintaan data BMN bersertipikat kepada BPN;
4. Pengalokasian anggaran sertifikasi

Pelaksanaan sertifikasi BMN berupa tanah terdiri dari tahapan:

1. Permintaan kepada K/L mengenai jumlah BMN yang sudah bersertifikat dan belum bersertifikat
2. Identifikasi BMN berupa tanah yang belum memiliki sertifikat. Identifikasi dilakukan dengan memetakan tanah belum bersertifikat pada K/L berdasarkan lokasi, luas tanah, nilai BMN dan nama pemilik
3. Penyusunan data BMN belum bersertifikat yang diperkirakan dapat disertifikatkan
4. K/L melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan sertifikasi untuk BMN yang tidak memiliki permasalahan
5. Penyampaian rekomendasi BMN berupa tanah berstatus clean and clear (dokumen persyaratan sertifikasi lengkap dan tidak memiliki permasalahan) kepada BPN untuk disertifikatkan
6. Pelaksanaan sertifikasi oleh BPN c.q. Kantor Pertanahan.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Untuk tahun 2021, target bidang tanah yang disertipikatkan adalah sebesar 215 bidang. Realisasi mencapai 222 bidang (capaian 103,26%), sebagaimana tabel berikut.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif						
	4a-CP Persentase Bidang Tanah BMN yang disertipikatkan (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	-	20%	20%	60%	100%	100%	100%
Capaian	-	81,86%	81,86%	91,63%	103,26%	103,26%	103,26%

Perbandingan Capaian Tahun 2019-2020

	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Target	72	299	215
Realisasi	72	350	222
Capaian	100%	117,06%	103,26%

3) Analisis Kinerja

Sertifikasi BMN berupa tanah yang dimiliki pemerintah serta digunakan oleh kementerian/lembaga untuk terciptanya tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum dalam pengelolaan Barang Milik Negara di wilayah kerja KPKNL Pekanbaru.

Berdasarkan tabel capaian, selama 3 tahun terakhir ini KPKNL Pekanbaru berhasil memenuhi sertifikasi yang telah ditargetkan setiap tahunnya. Adapun tindakan dilaksanakan oleh KPKNL Pekanbaru untuk memenuhi target dalam mensertifikatkan BMN berupa tanah adalah dengan mengajukan usulan sertifikasi BMN berupa tanah, rapat koordinasi dengan BPN dan Satker secara berkala. Langkah yang diambil KPKNL Pekanbaru adalah dengan mengadakan rapat persiapan dan monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan sertifikasi BMN berupa tanah serta melakukan koordinasi percepatan sertifikasi BMN berupa tanah dengan satker dan kantor pertanahan setempat. Selain itu perlu juga diadakan bimtek tentang tata cara permohonan sertifikat tanah

KPKNL Pekanbaru juga telah mengadakan Bimbingan Teknis dan *updating* data SIMANTAP serta melakukan koordinasi ke satuan kerja berdasarkan prioritas satker dengan BMN berupa tanah dan yang belum bersertifikat.

b) Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

1) Deskripsi Kinerja

Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara yang saat ini bernilai lebih dari Rp 6.000 trilyun (dengan mempertimbangkan hasil revaluasi aset).

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Penghitungan capaian kinerja ini adalah dengan membandingkan jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dengan target aset yang dievaluasi. Adapun target aset yang dievaluasi untuk tahun 2021 adalah sebanyak 272 aset, dan terealisasi sebanyak 332, atau sebesar 122,06%. Berikut rincian capaiannya.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif
	4b-CP Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Max/TLK)

T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-20
Target	15%	45%	45%	75%	100%	100%	100%
Capaian addendum	41,18%	62,87%	62,87%	106,99%	122,06%	122,06%	122,06%

3) Analisis Kinerja

Berdasarkan kertas kerja, review dilaksanakan secara langsung ke lapangan (tempat BMN berada). Namun karena adanya pandemi covid-19, maka tugas ke lapangan perlu dibatasi. Hal ini berdampak pada upaya pencapaian IKU.

Keterbatasan gerak, termasuk pemeriksaan ke lapangan, menjadi kendala utama dalam pencapaian IKU ini. Akhirnya KPKNL Pekanbaru memutuskan untuk mendahulukan pemeriksaan asset berupa rumah Negara. Hal ini bertujuan untuk melihat kinerja BMN (kesesuaian penggunaan BMN dengan peruntukannya). Program yang dilaksanakan adalah pemetaan BMN, pemilihan satker yang akan direview kinerja BMN-nya dan pemeriksaan ke lapangan.

c) Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

1) Deskripsi Kinerja

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakan pemanfaatan/ pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari

jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini memiliki target *average-minimize*. Artinya target ditetapkan adalah target paling tinggi, semakin rendah capaian maka semakin baik.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian Yang Efektif						
	4c-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (Max/AVG)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
Realisasi	0%	0%	0%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Capaian							199,64%

3) Analisis Kinerja

IKU ini menjadi tambahan pertimbangan bagi penilaian dalam menilai BMN yang diusulkan oleh Pengelola Barang. Permasalahan yang terjadi adalah ketika nilai limit atau nilai sewa yang diajukan satuan kerja tidak menunjukkan nilai wajar karena kurangnya pengetahuan dalam menilai. Hal ini dapat menyebabkan deviasi menjadi semakin tinggi. Mengatasi permasalahan tersebut, Seksi Penilaian meningkatkan koordinasi dengan Pengelola Barang, dalam hal ini Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

5. SASARAN STRATEGIS 5: PENERAPAN TATA KELOLA PIUTANG NEGARA DAN LELANG YANG EFEKTIF

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan piutang negara dan lelang, kegiatan tata kelola meliputi beberapa kegiatan seperti perencanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

a) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP

1) Deskripsi Kinerja

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKNP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKNP diukur dengan penjumlahan BKNP Lunas, BKNP Penarikan, BKNP dikembalikan, dan BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan total BKNP target BKNP 93 berkas.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi kinerja ini sampai dengan akhir tahun adalah sebanyak 100 berkas, dengan rincian sebagai berikut.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5a-CP Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	25%	50%	50%	75%	100%	100%	100%
Realisasi	28	54	54	80	100	100	100
Capaian	30,11%	58,06%	58,06%	86,02%	107,53%		

3) Analisis Kinerja

Percepatan penyelesaian berkas BKNP dari pelunasan didukung dengan adanya program Keringanan Utang (Crash Program) di tahun 2021. Terbitnya peraturan terbaru dalam pengurusan piutang Negara, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, juga turut mempercepat proses penyelesaian BKNP, terutama pada penerbitan PSBDT.

KPKNL Pekanbaru sudah memetakan berkas-berkas yang berpotensi untuk mengikuti crash program dan berkas-berkas yang dapat di-PSBDT. Dari hasil pemetaan, Seksi PN melakukan koordinasi dan upaya penagihan secara intensif dengan Debitur dan penyerah piutang.

b) Persentase Produktivitas Lelang

1) Deskripsi Kinerja

Produktivitas lelang dinilai dari seberapa seberapa intensitas frekuensi lelang yang laku. Apabila dalam satu frekuensi lelang terdapat lot barang yang laku dan tidak laku, maka tetap diperhitungkan sebagai sebagai satu frekuensi lelang laku.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini membandingkan antara frekuensi lelang laku dengan frekuensi lelang yang ada di tahun berjalan.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5b-CP Persentase Produktivitas Lelang (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	15%	20%	20%	25%	35%	35%	35%
Frekuensi lelang	97	255	255	489	722	722	722
Frekuensi lelang laku	52	105	105	225	338	338	338
Capaian	53,61%	41,18%	41,18%	46,01%	46,81%	46,81%	46,81%

3) Analisis Kinerja

Dilihat dari tingkat kelakuannya, dapat dikatakan bahwa persentase frekuensi lelang laku KPKNL Pekanbaru cukup tinggi, yaitu terealisasi 46,81% dari target 35% atau tercapai 133,76%. KPKNL Pekanbaru melakukan program/kegiatan dalam memasarkan produk lelang agar tingkat lakunya tinggi. Pemasaran dilakukan melalui papan pengumuman dan media sosial.

c) Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction

1) Deskripsi Kinerja

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. E-auction ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ALE (aplikasi lelang melalui email) dan ALI (aplikasi lelang melalui internet sehingga lebih real time dan terbuka).

Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau peserta lebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi: (1) Pelaksanaan Lelang e-Auction adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang; (2) E-Conventional Auction adalah lelang dengan kehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam

pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account).

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian diperoleh dari $((\sum \text{Frekuensi Lelang Tanpa Kehadiran peserta lelang}) / \sum \text{Frekuensi Lelang}) + (\sum \text{Frekuensi Lelang dengan Kehadiran Peserta lelang yang uang jaminannya menggunakan virtual account}) / \sum \text{Realisasi Frekuensi lelang}) \times 100\%)$.

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5c-CP Persentase Pelaksanaan Lelang e-auction dan e-conventional auction (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Frekuensi lelang	97	255	255	489	722	722	722
Frekuensi lelang eauction	97	255	255	489	722	722	722
Frekuensi lelang e-conventional	-	-	-	-	-	-	-
Capaian lelang e-auction	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian lelang e-conventional	-	-	-	-	-	-	-
Capaian IKU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian IKU diperoleh dari penjumlahan persentase pelaksanaan lelang e-auction dengan persentase pelaksanaan lelang conventional auction.

3) Analisis Kinerja

Sejak tahun 2017, KPKNL Pekanbaru telah menerapkan lelang e-auction. Dan di tahun 2018-2020 seluruh lelang dilaksanakan secara e-auction. Sehingga penerapan e-auction dan e-conventional auction tidak terlalu sulit untuk KPKNL Pekanbaru. Kesulitannya adalah mengedukasi pengguna layanan dan masyarakat untuk

menggunakan lelang e-acution. Namun hal ini terus disosialisasikan oleh KPKNL Pekanbaru.

Program dan kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan edukasi dengan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, website, dan media lainnya. Sehubungan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, kegiatan edukasi banyak dilakukan secara daring.

d) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

1) Deskripsi Kinerja

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Bidad Penguasaan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari 1) selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi, dan 2) selisih antara pembukuan PNBP MAP 425782 dan 425784 pada aplikasi Dropbox/Aplikasi lain Khusus Lelang* dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi.

Rekonsiliasi antara kedua data tersebut dilakukan maksimal tanggal 7 pada setiap periode bulan berikutnya setelah periode bulan berakhir. Target Deviasi PNBP dari Bidad PPN adalah 15%. Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sehingga rata-rata target 12,5%. Tingkat polarisasi IKU ini adalah minimize, artinya semakin kecil maka semakin baik tingkat capaiannya.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Capaian kinerja diperoleh dari rata-rata dari Deviasi PNBP PN + Rata-rata Deviasi PNBP Bea Lelang) / 2 per triwulannya. Berikut adalah rincian capaiannya:

K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Efektif						
	5d-CP Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target deviasi PNBP Lelang	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Target deviasi PNBP Lelang	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%

Capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Rata-rata target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%
Rata-rata capaian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Capaian IKU	200%	200%	200%	200%	200%	200%	200%

Dari tabel di atas, hasil realisasi mencapai nilai maksimal, dimana tidak ada selisih pembukuan antara aplikasi DJKN dengan aplikasi DJPB (aplikasi penghitungan PNBP).

3) Analisis Kinerja

Hasil capaian menunjukkan bahwa pencatatan PNBP oleh KPKNL Pekanbaru sudah sangat akurat dan tepat, sehingga tidak ada selisih sama sekali dengan pencatatan PNBP oleh KPPN.

6. SASARAN STRATEGIS 6: TINGKAT EFEKTIVITAS EDUKASI DAN KOMUNIKASI

Edukasi merupakan kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, pemberian masukan, konsultasi, atau arahan yang dilaksanakan dalam lingkup internal maupun eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas proses bisnis yang harus dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal sehingga output yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan dapat tercapai.

Ruang lingkup edukasi adalah (1) edukasi internal dari atasan/unit superintenden kepada bawahan/unit yang diawasi, dan (2) Edukasi eksternal dari kantor wilayah/KPKNL kepada pengguna layanan/masyarakat umum. Materi edukasi adalah terkait dengan pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, kekayaan negara dipisahkan, pengurusan piutang negara, dan lelang. Edukasi dapat dikatakan efektif apabila pihak yang dididukasi memberikan feedback yang positif atas tingkat pemahaman materi dan proses edukasi yang telah dilakukan.

a) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi digunakan untuk mengukur persepsi peserta atas 1) tingkat pemahaman, 2) kualitas materi, 3) kualitas fasilitator, dan 4) kualitas pendukung pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan. Proses edukasi dan komunikasi dilakukan dengan media seperti pelatihan, sosialisasi, atau workshop. IKU ini mengukur edukasi yang dilakukan oleh kanwil kepada pihak eksternal, seperti satuan

kerja (K/L), pemohon lelang, pembeli lelang, masyarakat, dan lainnya. Kegiatan edukasi ini dilakukan paling tidak sebanyak dua kali dalam setahun (setiap semester satu kali).

Pembobotan atas empat indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. tingkat pemahaman peserta (bobot 70%), dengan pertimbangan fokus pelaksanaan edukasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta,
2. kualitas materi (bobot 15%),
3. kualitas fasilitator (bobot 10%), dan
4. kualitas fasilitas pelatihan (bobot 5%).

Kuesioner dan cara perhitungan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi dapat diunduh pada tautan: http://bit.ly/FormatKuesioner_KertasKerjaReviu

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

Tingkat kepuasan	Skala
Sangat Efektif	$80 < x \leq 100$
Efektif	$60 < x \leq 80$
Kurang efektif	$40 < x \leq 60$
Efektif	$20 < x \leq 40$
Sangat tidak Efektif	$0 \leq x \leq 20$

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini diperoleh dari rata-rata tingkat edukasi pada seksi pengelolaan kekayaan Negara, lelang, dan piutang Negara.

K-Wide	Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi						
	6a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi (Max/AVG)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	-	95	95	-	95	95	95
Realisasi	-	96,62	96,62	-	96,525	96,525	96,57
Capaian							101,66%

PNBP	Capaian Edukasi dan Komunikasi		
	Target	Realisasi	Capaian
Seksi PKN	95	95,05	100,05%
Seksi Lelang	95	98	103,15%
Seksi PN	95	96,66	101,74%
Rata-rata	95	96,57	101,66%

3) Analisis Kinerja

Capaian dari IKU ini adalah hasil survey atas pelaksanaan sosialisasi. Dikarenakan adanya pandemi covid-19, dimana pertemuan tatap muka dibatasi, maka sosialisasi dilakukan secara daring. Pelaksanaan survey juga menggunakan *googleform*.

Pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2021 dilakukan secara daring ataupun melalui video tutorial. Pelaksanaan survey efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi pun dilaksanakan menggunakan *googleform*.

7. SASARAN STRATEGIS 7: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG EFEKTIF

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pemantauan dan pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala. Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi.

b) Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara

1) Deskripsi Kinerja

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya. IKU ini difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.

Kriteria ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Kategori	Jenis Persetujuan Utilisasi	Kriteria sudah Ditindaklanjuti
Pemanfaatan	Sewa	1. Surat perjanjian 2. SSBP
	Kerja Sama Pemanfaatan	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna	1. Surat perjanjian 2. SSBP (jika pada tahun penerbitan persetujuan sudah terdapat penerimaan)
	Pinjam Pakai	1. Surat perjanjian 2. Berita acara serah terima

Pemindahtanganan	Penjualan	1. Risalah lelang atau dokumen perjanjian jual/sewa beli dalam hal penjualan dilakukan tanpa melalui lelang 2. SSBP
	Tukar Menukar	1. Berita acara serah terima 2. Keputusan penetapan status penggunaan untuk barang pengganti
	Hibah	Berita acara serah terima

2) Perbandingan Capaian Kinerja

IKU ini diperoleh dari perbandingan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 s.d. semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh satker K/L dengan Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020 s.d. semester I 2021.

K-Wide	Pengawasan dan pengendalian yang efektif						
	7a-CP Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan KN (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	-	40%	40%	-	85%	85%	85%
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester II 2020 yang ditindaklanjuti oleh K/L		45	45	-	47	47	47
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester II 2020	-	50	50	-	50	50	50
Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN periode semester I 2021 yang ditindaklanjuti oleh K/L	-	21	21	-	32	32	32

Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan pengelola barang periode semester I 2021	-	35	35	-	35	35	35
Capaian	-	77,65%	77,65%	-	92,94%	92,94%	92,94%

3) Analisis Kinerja

Tindak lanjut seharusnya dilaporkan dan diupload di aplikasi SIMAN. KPKNL Pekanbaru melakukan monitoring melalui menu/plugin pengawasan dan pengendalian pada SIMAN. Namun tidak semua Satuan Kerja tertib melaporkan dan mengupload tindak lanjutnya. Masalahnya adalah masih ada satuan Kerja yang belum memahami tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN, sehingga masih sering dikonfirmasi oleh KPKNL Pekanbaru.

Menindaklanjuti permasalahan yang ada, KPKNL Pekanbaru meningkatkan edukasi tentang tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN selalu disampaikan bersamaan dengan sosialisasi pengelolaan BMN. KPKNL Pekanbaru juga membuat video-video singkat dan infografis yang diupload ke media social untuk memudahkan satuan kerja.

8. SASARAN STRATEGIS 8: SDM YANG KOMPETEN

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kompetensi teknis yang mumpuni, serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

a) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

1) Deskripsi Kinerja

Mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 24 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 24 jamlat.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DK1.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:

- bawahan yang akan pensiun di tahun 2021;
- bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
- bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2021;
- Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2021 tidak diperhitungkan di unit barunya
- pegawai pada unit non-eselon

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Terdapat dua capaian pada IKU ini, yaitu capaian utama dan capaian tambahan. Capaian IKU ini adalah penjumlahan capaian utama dan capaian tambahan. Capaian utama diperoleh dari perbandingan jumlah bawahan yang memenuhi kriteria dengan jumlah bawahan total. Sedangkan capaian tambahan diperoleh dari jumlah bawahan yang telah melebihi kriteria dengan jumlah bawahan total.

K-Wide	SDM yang Kompeten						
	8a-N Persentase Pengembangan Potensi Pegawai (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	15%	40%	40%	75%	100%	100%	100%
Capaian utama	32,26%	65,63%	65,63%	93,10%	100%	100%	100%
Capaian tambahan	32,26%	65,63%	65,63%	93,10%	100%	100%	100%
Capaian IKU	38,71%	78,75%	78,75%	111,72%	120%	120%	120%

Dari 29 pegawai bawahan, seluruhnya telah melebihi kriteria.

3) Analisis Kinerja

Sejak pandemi covid-19, kegiatan diklat dilaksanakan melalui daring, baik melalui medie e-learning yang disediakan oleh Kementerian Keuangan (KLC/Kemenkeu Learning Center), maupun melalui program Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) yang diselenggarakan oleh unit pengembangan kompetensi pegawai di Kementerian Keuangan. Dengan adanya KLC, pegawai semakin mudah mendapatkan pelatihan dan pendidikan, bahkan pegawai dapat memilih jenis pelatihan yang sesuai tugas dan fungsi atau selainnya.

Program atau kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah monitoring secara berkala atas diklat mana saja yang diikuti pegawai. Dengan metode e-learning, subbagian umum tidak dapat mengetahui data/informasi diklat yang sudah dijalankan oleh masing-masing pegawai. Alat monitoring pegawai yang sudah diikuti. Subbagian Umum menggunakan link <https://tinyurl.com/jamlatpku> untuk menghitung jumlah jam pelatihan pegawai KPKNL Pekanbaru.

Selain dari yang KLC, Subbagian Umum juga selalu menginformasikan adanya diklat yang diselenggarakan untuk pegawai DJKN, yang usulannya dapat diakses melalui <http://10.242.77.20/diklat>.

9. SASARAN STRATEGIS 9 : ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

Organisasi yang fit-for-purpose adalah organisasi yang memiliki desain struktur dan mekanisme kerja (value chain) yang selaras dengan tujuan organisasi.

a) Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja

1) Deskripsi Kinerja

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan metode BSC dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah. Peraturan terkait pengelolaan kinerja berbasis BSC ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pengelolaan kinerja dilakukan, diperlukan pelaksanaan review atas implementasi pengelolaan kinerja tersebut.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi dan intensitas edukasi pengelolaan kinerja. Masing-masing

komponen diberikan bobot dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kebutuhan organisasi, sebagaimana berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	25%
2	Pelaksanaan/eksekusi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	30%
4	Intensitas Edukasi Kinerja (Kualitas Substansi dan Dokumentasi)	15%
TOTAL		100%

Proses penilaian tingkat kantor wilayah dilakukan oleh MKO Kantor Pusat DJKN. Sedangkan tingkat KPKNL dilakukan penilaian oleh tingkat Kanwil (SMKO). MKO akan melakukan verifikasi secara sampling terhadap hasil penilaian Kanwil kepada KPKNL.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi IKU ini diperoleh dari Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja dari Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri. Adapun nilai dan predikat yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Nilai	Predikat
$90 \leq X \leq 100$	Kami mengelola kinerja dengan sangat baik
$80 \leq X < 90$	Kami mengelola kinerja dengan baik
$70 \leq X < 80$	Kami mengelola kinerja dengan cukup baik
$50 \leq X < 70$	Kami mengelola kinerja dengan kurang baik
< 50	Kami mengelola kinerja dengan tidak baik

K-Wide	Organisasi yang Fit For Purpose						
	9a-N Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja (Max/TLK)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	-	-	-	-	75	75	75
Realisasi	-	-	-	-	96,65	96,65	96,65
Capaian	-	-	-	-	128,87%	128,87%	128,87%

3) Analisis Kinerja

Dari hasil capaian yang sangat baik menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan pengelolaan kinerja KPKNL Pekanbaru sudah sangat baik, sehingga setiap proses dalam pengelolaan kinerja dilakukan dengan baik, disertai dengan dokumentasi yang memadai. Terkait pengelolaan kinerja, tidak ada masalah dalam pelaksanaannya. Karena pimpinan, seksi Kepatuhan Internal dan seluruh pegawai juga peduli dalam pelaksanaannya.

Seksi Kepatuhan Internal selaku pengelola kinerja tingkat KPKNL melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan kinerja sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan. Seksi KI juga memiliki alat bantu (menggunakan googlesheet) dalam memonitoring capaian kinerja organisasi setiap bulan.

b) Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator

1) Deskripsi Kinerja

Tingkat efektivitas FGD Pejabat Administrator merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai kecepatan pelaksanaan FGD dan feedback peserta (pegawai di bawah koordinasi Pejabat Administrator terkait) terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu: 1) kecepatan, mengukur seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD, kemudian 2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO). Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

1. Content (topik materi dan pesan yang disampaikan).
2. Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
3. Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai).

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut:

1.Kecepatan	No	Nilai/Angka	Waktu pelaksanaan FGD sejak Pra-FGD
	1	100	≤3 hari kerja
	2	90	4 - 7 hari kerja
	3	80	8 - 10 hari kerja
	4	70	>10 hari kerja
	5	0	tidak melaksanakan FGD
2.Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD		

Formula IKU indeks efektivitas FGD adalah $(40\% \times \text{nilai kecepatan}) + (60\% \times \text{nilai feedback peserta})$. Dari hasil tersebut, akan diperoleh interpretasi per kelompok, sebagaimana rincian berikut:

No	Nilai/Angka	Interpretasi
1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	< 60	Tidak Efektif

FGD Pejabat Administrator dilaksanakan per triwulan, sehingga mendapatkan realisasi sebagaimana rincian berikut:

K-Wide	Organisasi yang Fit For Purpose						
	9b-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator (Max/AVG)						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	80	80	80	80	80	80	80
Realisasi	98,9	99	98,95	99,90	99,60	99,35	99,35
Capaian							124,19%

3) Analisis Kinerja

FGD Pejabat Administrator dilaksanakan per triwulan dengan materi yang diperoleh sebelumnya melalui FGD Pejabat Administrator dengan Kantor Pusat. FGD yang dilakukan, baik dengan Kantor Pusat maupun dengan pegawai KPKNL Pekanbaru, dilaksanakan secara daring. Capaian kinerja IKU ini sangat memuaskan karena Kepala Kantor/Pejabat Administrator memenuhi kedua aspek (kecepatan dan feedback peserta) dengan nilai sangat baik, ditambah dengan dokumentasi yang memadai, seperti undangan, daftar hadir, notula dan feedback.

10. SASARAN STRATEGIS 10: PENGELOLAAN KEUANGAN YANG OPTIMAL

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik/pemerintahan adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. DIPA

merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

a) **Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

1) Deskripsi Kinerja

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi. Definisi masing-masing indikator mengacu pada SE-8/MK.1/2020 terkait Tata Cara perhitungan IKU PKPA lingkup Kemenkeu.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Q1, Q2 dan Q3 = 100% x IKPA

Q4= (60%x SMART + 40% x IKPA)Formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

K-Wide	Pengelolaan Keuangan yang Optimal						
	10a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
Realisasi	94,52%	97,49%	97,49%	97,83%	94,89%	94,89%	94,89%
Capaian							99,36%

3) Analisis Kinerja

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun 2021 kurang optimal dikarenakan capaian output yang besar dibarengi dengan penyerapan anggaran yang besar. Hal ini menyebabkan penilaian pada sistem SmartDJA menjadi rendah, sehingga capaian atas kualitas pelaksanaan anggaran KPKNL Pekanbaru berstatus kuning (target tahunan hampir tercapai).

Subbagian Umum selalu melakukan monitoring terhadap capaian output dan penyerapan anggaran.

b) Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Temuan BA 015

1) Deskripsi Kinerja

Penyelesaian temuan BPK dihitung dari persentase rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti.

2) Perbandingan Capaian Kinerja

Realisasi IKU terdiri dari:

$$\text{Semester I} = (a/b) \times 100\%$$

$$\text{Semester II} = \{(a+c)/(d+e)\} \times 100\%$$

Keterangan:

- a = 1. Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai; dan
2. Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti.
- b = 1. Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK; dan
2. Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018.
- c = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 yang diusulkan selesai sampai dengan Semester II tahun 2019
- d = Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 Tahun 2018
- e = 1. Jumlah rekomendasi BPK dalam LHP LK BA 15 sampai dengan tahun 2017 dalam Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK semester I tahun 2018; dan
2. Jumlah konsep temuan LK BA 15 Tahun 2018 yang selesai ditindaklanjuti.

Dalam hal LHP keluar setelah semester I, maka penghitungan komponen a1 dan b2 diperhitungkan pada saat LHP dikeluarkan oleh BPK.

K-Wide	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal						
	10b-CP Persentase Tindaklanjut Penyelesaian Temuan BA 015						
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Y-21
Target	-	-	-	-	90%	90%	90%

Realisasi	-	96,25%	96,25%	96,25%	96,25%	96,25%	96,25%
Capaian							106,94%

3) Analisis Kinerja

Penyelesaian IKU ini sangat tergantung pada pihak ketiga. Namun upaya penagihan dan penyelesaian tetap dilaksanakan, sehingga target dapat tercapai. KPKNL Pekanbaru telah melakukan upaya melalui surat dinas, telepon maupun email.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan data realisasi anggaran penyerapan anggaran per 31 Desember 2021, berikut disajikan Tabel Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2021.

Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi SAKTI (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

Realisasi Anggaran KPKNL Pekanbaru Tahun Anggaran 2021

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Barang	1.758.965.000,00	1.729.533.051,00	98,33
Belanja Modal	54.373.000,00	54.373.000,00	100
Belanja Pegawai	0	0	0
Total	1.813.338.000,00	1.783.906.051,00	98,4%

Persentase penyerapan anggaran di KPKNL Pekanbaru pada tahun 2021 adalah sebesar 99,05%. Sejak tahun 2021, belanja pegawai sudah terpusat di Eselon I (DJKN), sehingga kantor vertikal tidak dibebankan belanja pegawai lagi.

Pada halaman selanjutnya terdapat Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Pekanbaru dari Tahun 2020 s.d. 2021. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 s.d. 2021 persentase realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan penurunan.

**Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran KPKNL Pekanbaru dari Tahun 2020 s.d.
2021**

	2020			2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	1.805.105.000,00	1.781.979.550,00	98,72	1.758.965.000,00	1.729.533.051,00	98,33
Belanja Modal	460.783.000,00	460.479.776,00	99,93	54.373.000,00	54.373.000,00	100
Belanja Pegawai	1.207.334.000,00	1.197.926.507,00	99,22	0	0	0
Total	3.473.222.000	3.440.385.833	99,05	1.813.338.000,00	1.783.906.051,00	98,4%

C. ACHIEVEMENT / PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Di tahun 2020, KPKNL Pekanbaru telah mendapatkan predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya di tahun 2021, KPKNL Pekanbaru meraih penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, KPKNL Pekanbaru juga mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Kinerja Terbaik Tahun 2021 dari Kepala Kanwil DJKN Riau, Sumbar, dan Kepri.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPKNL Pekanbaru tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan KPKNL Pekanbaru dalam tahun anggaran 2021 yang disusun sebagai pelaksanaan terhadap Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

KPKNL Pekanbaru merupakan organisasi yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan Negara, piutang negara dan lelang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, KPKNL Pekanbaru mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.

Adanya berbagai hambatan dan permasalahan merupakan pembelajaran yang berharga untuk perbaikan kinerja tahun yang akan datang. Berbagai hambatan baik internal maupun eksternal diharapkan dapat diatasi untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan KPKNL Pekanbaru dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Pekanbaru, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.